

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Konstruksi hukum bisnis atas insentif fiskal berbasis kepatuhan lingkungan menunjukkan relasi normatif antara negara sebagai regulator dan korporasi sebagai penerima manfaat fiskal. Hubungan ini berbentuk *regulatory contract* yang mengikat melalui regulasi, bukan kontrak privat. Insentif seperti *tax holiday* hanya diberikan jika perusahaan memenuhi kewajiban lingkungan, termasuk AMDAL dan pelaporan berkelanjutan. Prinsip *good faith*, *mutual accountability*, dan *strict liability* memperkuat konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, hukum bisnis berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku ekonomi yang menautkan kebijakan fiskal dengan transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
2. Implementasi insentif fiskal hijau di Indonesia masih menghadapi hambatan serius secara normatif dan kelembagaan. Ketiadaan audit lingkungan pasca-insentif, lemahnya koordinasi antar lembaga seperti DJP, KLHK, dan BKPM, serta absennya klausul sanksi konkret dalam regulasi seperti PMK No. 130/PMK.010/2020 dan PP No. 78/2019 mengurangi efektivitas kebijakan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan mekanisme kepatuhan yang terstruktur, insentif berisiko dimanfaatkan sebagai formalitas administratif, bukan instrumen transformatif bagi agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau.

1.2 Saran

1. Pemerintah perlu merevisi dan memperkuat kerangka regulasi insentif fiskal hijau dengan menambahkan klausul yang mewajibkan evaluasi lingkungan pasca-investasi serta sanksi administratif bagi perusahaan

yang tidak memenuhi komitmen keberlanjutan. Hal ini bertujuan agar prinsip regulatory contract tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan dapat ditegakkan secara hukum.

2. Diperlukan pembentukan sistem koordinasi lintas lembaga yang lebih integratif antara DJP, KLHK, dan BKPM, termasuk melalui platform pelaporan terintegrasi dan audit lingkungan bersama. Pendekatan ini mendukung penerapan prinsip mutual accountability serta memastikan bahwa insentif benar-benar menjadi alat regulasi yang mendorong transisi menuju ekonomi hijau.

